

KOMUNIKASI SOSIAL DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN POLRI

Adi Nugroho *)

ABSTRAK

Komunikasi Sosial (komsos) sebagaimana dalam studi-studi komunikasi lainnya, pastilah mempunyai tujuan. Satu hal yang penting dalam konteks komunikasi sosial adalah tujuan yang hendak dicapai dalam komunikasi ini adalah masyarakat sebagai sebuah entitas sosial, serta perubahan sosial ke arah yang makin bermakna bagi kemajuan masyarakat. Komunikasi sosial juga dapat didorong untuk mencapai peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam kerangka pengembangan masyarakat dan terbangunnya suatu situasi komunikasi sosial yang memungkinkan arus informasi dapat berjalan dan membawa dampak positif.

Kata kunci: komunikasi sosial, keterbukaan informasi publik.

A. PENDAHULUAN

Komunikasi sosial sampai saat ini masih menjadi kajian yang penting mengingat keberhasilan dari suatu proses perubahan sosial sebuah bangsa antara lain juga dapat dilihat dari seberapa tinggi tingkat partisipasi publik. Sedangkan partisipasi publik itu tentu dapat dilakukan manakala terjadi sebuah proses komunikasi bermakna yang mampu mendorong ke arah terbangunnya situasi bagi partisipasi publik itu dan juga proses pengambilan keputusan di kalangan masyarakat. Hal itu tentu pada gilirannya mampu menciptakan suatu perubahan sosial ke arah yang diharapkan bersama dan makin membaiknya arus informasi yang memberikan manfaat bagi upaya-upaya pengambilan keputusan yang strategis

dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

B. KOMUNIKASI SOSIAL DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Komunikasi sosial sendiri jika demikian, dimaksudkan sebagai suatu proses mendorong perubahan sosial dengan mengandaikan adanya partisipasi yang luas dalam suatu masyarakat dan pada gilirannya dimaksudkan pula untuk mendorong kemajuan sebuah masyarakat, serta kemudian makin diharapkan meningkatkan kesejahteraan suatu masyarakat, serta makin terbentuknya ketertiban sosial.

Di samping itu tujuan berikutnya adalah terselenggara dan makin bertambahnya jaminan rasa keadilan serta tersedianya kemungkinan untuk dapat

*) Dosen Program S2 Kebijakan Media, Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro

melakukan kontrol sosial, memberikan *feedback* serta kritik yang konstruktif. Bukan tidak mungkin, apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik mengandung kekurangan-kekurangan sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas pada akhirnya diharapkan dapat memperbaiki kondisi sebuah masyarakat dan memperbaiki kualitas kehidupan sebuah bangsa (Forkapi 2009:22).

Dalam melaksanakan perubahan sosial, tentu saja aspek-aspek yang berkaitan dengan komunikasi sosial yang dapat ditekankan terutama adalah melalui fungsi dan peranan media massa, atau melalui media-media umumnya. Fungsi media massa sejalan dengan fungsi komunikasi massa yang mencakup informasi, pendidikan, persuasi, serta kontrol sosial (Nurudin 2003:63). Fungsi dan peranan media massa inilah yang dapat dimanfaatkan pula bagi upaya institusi kepolisian dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat yang lebih cepat, lebih baik dan berhasil (Akp01 2009:55).

Lembaga kepolisian tentu saja dapat mendayagunakan penggunaan media massa, baik bagi keperluan penyampaian beragam kebijakan dan informasi tentang kepolisian yang harus disebarluaskan kepada masyarakat, serta dapat pula memanfaatkan keberadaan media massa untuk mengambil dan memanfaatkan masukan, pendapat, atau sejenis itu lainnya yang disampaikan oleh segenap komponen masyarakat.

Meski juga dalam konteks kelembagaan, lembaga kepolisian selama ini juga sudah dapat memanfaatkan peranan lembaga-lembaga semacam komisi kepolisian nasional, yang acap kali memberi masukan cukup berharga bagi peningkatan peranan, respons serta kemampuan kepolisian RI.

Pemanfaatan media massa bagi kepolisian dapat dilakukan, misalnya dengan upaya kepolisian dalam menyebarkan kebijakan-kebijakan baru, peraturan-peraturan baru, atau informasi aktual baru yang berlaku dan penting bagi masyarakat, serta sekaligus pula dapat memetik manfaat dari apa yang disajikan media massa bagi upaya membangun dan mendorong kemajuan institusi kepolisian. Memang acapkali melalui media massa juga disampaikan kritik masyarakat terhadap kekurangan-kekurangan lembaga ini, namun demikian jika dirasakan sebagai masukan konstruktif kiranya hal itu wajar disikapi dengan bijak.

Namun demikian, jika memang terdapat ketidak-akuratan sehingga berpengaruh pada reputasi dan pencitraan lembaga kepolisian, dapat pula dilakukan tanggapan proporsional melalui divisi kehumasan yang ada untuk membangun reputasi dan memperbaiki pencitraan tersebut.

Memang masalah-masalah yang berkaitan dengan media dan kemungkinan kekurangakuratan media, dapat saja terjadi. Pengawasan yang perlu pula dilakukan atas keberadaan media dan bagaimana media dapat ber-

fungsi secara optimal, terutama hal ini dikaji dalam studi-studi mengenai kebijakan media (*media policy*). Namun demikian dapat kita tekankan, peranan positif yang masih bisa diperankan media massa dan coba kita kaitkan untuk mendorong pelayanan institusi kepolisian dan dapat pula dilakukan untuk melakukan publikasi-publikasi mengenai keberhasilan institusi kepolisian.

Dalam konteks ini dapat didorong pula sebuah peran positif media dalam upaya besar memajukan sebuah bangsa atau secara khusus juga dapat dipergunakan bagi pengembangan institusi kepolisian. Kepolisian sendiri dalam konteks sebagai lembaga publik memang diharuskan untuk bersifat terbuka, terutama berkaitan dengan informasi-informasi publik yang penting bagi masyarakat. Memang dalam UU Keterbukaan Informasi Publik sendiri dalam salah satu pasalnya memberi perkecualian terutama tentang informasi yang bersifat belum tetap dan misalnya juga jika dibuka akan menghambat proses penegakan hukum (Kominfo 2008:12).

Informasi yang bersifat perkecualian itu memang mungkin jika ditilik dapat berada dalam ranah lembaga kepolisian terutama dalam tugasnya menjalankan penegakan hukum dan karenanya tidak semua informasi dapat bersifat terbuka bagi publik. Namun demikian harus dipahami bahwa perundang-undangan keterbukaan informasi publik ini memang sejalan dengan ke-

inginan pemerintah dan segenap pihak, agar masyarakat mendapatkan perlakuan mudah memperoleh informasi yang penting bagi publik dan pada masa lalu sulit diperoleh masyarakat.

Komunikasi sosial dalam pembahasan berikutnya tentu saja juga harus selalu dikaitkan dengan arah perkembangan suatu bangsa yang disepakati oleh segenap warga negaranya. Tentu saja dengan kemungkinan terdapatnya perbedaan kondisi untuk suatu masyarakat bangsa satu bisa berbeda jika diperbandingkan dengan masyarakat bangsa lainnya.

Bahkan sebenarnya dalam sebuah bangsa Indonesia sendiri karena keanekaragaman suku bangsa, bisa saja pola komunikasi yang diterapkan dapat saja berbeda. Jika ini tidak diperhatikan dapat pula menjadi sebuah kendala penting bagi cara pengkomunikasian sosial (Deddy Mulyana 2007:178). Di sini artinya, keberhasilan komunikasi sosial disebuah negara lain, tidak serta merta dapat diklaim seluruhnya akan berhasil untuk dapat diterapkan bagi upaya komunikasi sosial bagi bangsa Indonesia.

Namun demikian model atau polanya tentu dapat saja dipergunakan sebagai kerangka dasar pengembangan dengan menyesuaikan penerapannya melalui sejumlah kondisi yang relevan. Di sini artinya, tidak seluruh apa yang berhasil dalam pengkomunikasian ide atau gagasan serta upaya diseminasi di suatu negara dapat berhasil seluruhnya diterapkan polanya di negara ini.

Yang hampir dapat dikatakan sama dalam komunikasi sosial di kebanyakan negara lainnya adalah bahwa pada dasarnya komunikasi sosial merupakan sebuah proses penyebaran pesan-pesan yang ditujukan untuk masyarakat yang pada gilirannya dapat mengubah sikap, pendapat dan perilaku masyarakat, tentu dalam konteks mencapai kemajuan dan makin meningkatnya kualitas institusi kepolisian RI dan kualitas masyarakat Indonesia.

C. KOMUNIKASI SOSIAL DALAM KELEMBAGAAN POLRI

Kini kita mencoba melakukan satu pembahasan bagaimana kaitannya sebuah proses komunikasi, bagaimana juga sebuah komunikasi sosial dapat didorong untuk mendukung peningkatan kualitas dan peranan kepolisian RI bagi masyarakat, serta bagi kemajuan bangsa, yang tentu saja penting untuk memperkuat sebuah arah pembangunan bangsa. Peranan institusi kepolisian dalam beragam level tentu harus semakin dipertajam berkaitan pula dengan kondisi bangsa Indonesia yang tentu diharapkan makin maju dan berkembang. Termasuk tentu saja sangat penting dalam konteks pencatatan dan peranannya di era global saat ini, dimana juga makin tipis atau tiadanya batas antar bangsa, salah satunya akibat kemajuan teknologi komunikasi dan teknologi informasi. Komunikasi sosial yang harus makin bermakna jika demikian tentu akan menjadi makin penting.

Masalahnya kini, bagaimana komunikasi sosial tersebut dapat dikaitkan dengan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan Polri yang berada dalam kondisi masyarakat yang makin turut maju pula dan di sisi lain makin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat secara umum.

Dalam lingkungan kepolisian akhir-akhir ini sebenarnya sudah ada upaya mengajak serta masyarakat untuk berperan aktif bersama kepolisian dalam program semacam perpolisian masyarakat (Polmas), yang cukup efektif juga bagi upaya membangun kebersamaan masyarakat dan kepolisian dalam turut serta menciptakan kepastian hukum dan mengajak serta masyarakat pada umumnya melaksanakan tertib hukum dan tertib sosial, yang terutama penting dilakukan mengingat masih relatif sedikitnya polisi jika dibandingkan dengan penambahan jumlah penduduk dan kompleksitas permasalahan di masyarakat yang jumlahnya pun dapat saja terus mengalami peningkatan.

Dengan demikian perpolisian masyarakat ini dapat pula menjadi alternatif mengkomunikasikan perpolisian dan upaya-upaya penyadaran hukum di kalangan masyarakat luas. Dengan sejumlah perbaikan pola perpolisian masyarakat dapat dipergunakan untuk mendorong komunikasi sosial kepolisian yang makin penting pada waktu-waktu yang akan datang.

Selanjutnya tentu komunikasi sosial di atas haruslah pula melihat

faktor-faktor yang berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi massa baru, sehingga senantiasa dan terus menerus dapat mengantisipasi beragam sisi-sisi kemajuan dalam berbagai bidang, dan kemudian dapat didorong untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan segenap anggota Polri pada pelayanan masyarakat menuju masyarakat yang makin mandiri.

Pemanfaatan teknologi komunikasi dapat diterapkan lembaga kepolisian pula dalam peningkatan kecepatan penginformasian bagi masyarakat di satu sisi serta di sisi lain dapat pula menjadi informasi cepat yang berharga bagi kepolisian yang disampaikan oleh masyarakat. Misalnya, masyarakat dengan mudah kini dapat memberi informasi bagi kepolisian yang sebelumnya terkendala oleh jarak atau geografis. Kemudahan itu tentu dapat dianggap sebagai sebuah sisi positif peran serta masyarakat dalam membantu tugas-tugas kepolisian.

Hal itu di atas juga didasari kenyataan bahwa masyarakat kini juga makin mudah memperoleh akses-akses informasi termasuk internet, dan terutama pada generasi-generasi muda saat ini. Namun memang harus diakui, kemajuan informasi ini belum menjangkau keseluruhan wilayah di Indonesia, dan terutama masih berada di seputar perkotaan atau kawasan utama di negara kita ini, dan harus melalui tahapan komunikasi dua tahap (*two step flow communications*) jika ingin sampai me-

rata sampai di pedesaan atau pelosok negeri (Wiryanto 2005:42). Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi itu tentu saja dapat dinilai sebagai sebuah peluang dapat berperan sertanya masyarakat dalam memberi bantuan kepada kepolisian.

Dengan kondisi dan harapan yang digambarkan seperti di atas maka model-model komunikasi sosial yang diperankan Polri haruslah terus menerus menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang berubah dan juga menyesuaikan diri dengan beragam kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi termasuk teknologi-teknologi komunikasi baru. Hal ini memang disadari akan saling berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas SDM sebuah bangsa. Dan dalam konteks ini tentu saja penekanannya pada tersedianya kualitas informasi yang penting bagi masyarakat di satu sisi dan bagi Polri di sisi lainnya.

Hal-hal di atas memang di satu sisi harus disikapi lembaga kepolisian dengan terus berupaya meningkatkan kemampuan dan SDM para polisi, terutama mereka yang berada di tengah masyarakat secara langsung, sehingga polisi dapat lebih baik lagi, lebih cepat dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Pada gilirannya, jika ini terjadi dan dikomunikasikan dengan baik oleh segenap insan PR atau kehumasan kepolisian, dapat pula mendorong peran serta masyarakat dan peranan masyarakat dalam mendukung Polri dalam menjalankan tugas-tugas

penegakan hukum dan bersama-sama menciptakan tertib sosial dan tertib hukum.

Komunikasi sosial seperti dikemukakan di atas juga hendaknya pada akhirnya dapat mendorong terpilihnya informasi-informasi yang berkualitas, informasi-informasi akurat, relevan dan informasi penting dalam konteks pelayanan Polri kepada masyarakat dan mendorong terjaminnya kepastian hukum bagi segenap pihak.

Namun demikian sejalan dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, terutama yang relevan bagi Polri adalah makna bahwa keterbukaan publik itu adalah keharusan, namun juga perundangan itu memungkinkan pengecualian bagi informasi tertentu yang tidak harus segera dibuka, misalnya karena dalam dunia kepolisian terdapat upaya penyelidikan, penyidikan dan proses hukum lainnya, yang mungkin saja tidak semuanya dapat bersifat terbuka untuk publik (Kominfo,2008:14). Dengan demikian di sini perlu kearifan segenap pihak baik masyarakat, Polri serta komisioner lembaga Komisi Informasi Publik untuk memberikan penilaian.

Kualitas informasi yang dimaksudkan disini juga adalah makin tersedianya dengan mudah dan terbuka jenis-jenis informasi tertentu yang penting bagi upaya meningkatkan kualitas pelayanan Polri dan dalam kerangka pula meningkatkan pengembangan demi kemajuan sebuah proses hukum di masyarakat.

Yang dapat dilakukan dalam konteks tersebut tentu saja dapat memanfaatkan beberapa media massa baik itui media konvensional maupun media massa dan media-media baru, yang bermanfaat bagi penyebaran segenap pengetahuan, keahlian dan ketrampilan-ketrampilan baru, yang tentunya akan sangat terkait dengan peningkatan kualitas lembaga dan layanan Polri itu sendiri. Jika hal itu terjadi, maka pengembangan masyarakat ke arah lebih baik dan maju serta penegakan hukum akan diharapkan dapat makin terwujudkan.

Mengenai kualitas informasi yang dikemukakan di atas pada dasarnya merupakan serangkaian muatan pesan-pesan komunikasi sosial yang relevan dengan upaya dan keinginan bangsa ini untuk terus menerus meningkatkan dan mengembangkan diri. Tentu saja pesan komunikasi sosial tersebut dapat dikaitkan dengan tersedianya data dan informasi untuk sektor-sektor yang penting dan relevan dengan tugas kepolisian. Dapat pula dilakukan upaya untuk mendorong ke arah partisipasi aktif publik dan segenap layanan untuk memanfaatkan informasi-informasi yang disediakan oleh kelembagaan Polri dalam berbagai tingkatan dan sejalan dengan upaya polri untuk mendapatkan trust (kepercayaan) dari segenap masyarakat.

Sebaliknya juga dengan kemajuan teknologi komunikasi yang ada, pemerintah, kepolisian, lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya serta pihak-pihak yang berkompeten dapat

memanfaatkan partisipasi aktif masyarakat dan memberikan respon yang relevan, atau menindaklanjuti dengan pembahasan-pembahasan atas masalah-masalah yang disampaikan warga negara yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan-kebijakan yang berguna dan penuntasan masalah-masalah hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Dengan demikian setelah dua tahun diundangkannya masalah keterbukaan informasi publik dan mulai berlakunya UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), masyarakat juga diharapkan makin mendapatkan layanan-layanan dan akses informasi penting yang mungkin saja pada masa lalu terkendala karena perilaku institusi publik yang tidak suportif dengan harapan dan keinginan publik. Pada gilirannya dengan keterbukaan informasi publik juga dapat didorong untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendorong suatu tanggung jawab yang harus dijalankan oleh badan-badan dan institusi publik.

Keterbukaan informasi publik tersebut juga tentu saja merupakan keinginan agar setiap warga memiliki akses yang setara untuk memperoleh layanan-layanan publik dan tidak lagi ada diskriminasi sebagai akibat pada masa sebelumnya dimana terkadang akses informasi penting tertentu ditutup dan publik sulit memperolehnya, sehingga tentu saja muncul masalah keadilan sosial dalam penginformasian pesan-pesan bagi publik (UU KIP 2008: 2).

D. KOMUNIKASI SOSIAL DAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPOLISIAN

Komunikasi sosial seperti yang diuraikan di atas guna mendukung peningkatan kualitas layanan polri pada dasarnya relatif sama dengan proses komunikasi pada umumnya, dimana pesan-pesan disampaikan dari sumber atau komunikator kepada penerima. Segenap komponen komunikasi tentu terkait dengan proses penyampaian pesan itu, mulai dari komunikatornya, pesan seperti apa yang tepat untuk disampaikan, melalui saluran komunikasi semacam apa dan kepada sasaran komunikasi dengan karakteristik seperti apa. Sasaran komunikasi kepada penerima pesan misalnya, dalam konteks masyarakat Indonesia juga bisa beragam. Kita memahami bahwa kemajemukan bangsa ini, membuat sebuah pesan komunikasi sosial misalnya tidak dapat digeneralisir untuk kemudian dapat disamakan untuk semua lapisan masyarakat.

Belum lagi jika dikaitkan dengan tingkat pendidikan, status sosial ekonomi beragam masyarakat yang acapkali mengharuskan pesan komunikasi dirancang agar tepat sasaran. Memang mungkin saja ada pesan-pesan yang bersifat umum dan dapat diterima beragam kalangan masyarakat. Akan tetapi kita menyadari, terkadang terdapat perbedaan yang cukup signifikan, sehingga pesan-pesan komunikasi sosial pun tentu saja harus disampaikan dengan menyesuaikan dan dapat mudah

dipahami oleh masyarakat.

Komunikasi sosial selain itu juga hendaknya dapat mendorong masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam suatu kegiatan pembangunan yang bermanfaat bagi publik yang pada kelanjutannya dapat kembali pula kemanafaatannya pada masyarakat itu sendiri. Dengan partisipasi yang didorong oleh karena terbangunnya komunikasi yang baik itu, maka suatu ketika juga akan berkaitan dengan pengembangan suatu masyarakat. Peran dari masyarakat tentu saja mengandaikan sebuah hal penting dimana masyarakatnya sendiri juga diharapkan berkualitas. Hal itu kiranya bisa didorong dengan tersedianya media-media yang mampu membawa pesan-pesan komunikasi sosial dengan kualitas yang baik, kualitas informasi yang penting termasuk di lingkungan kepolisian RI.

Masalah-masalah yang kiranya perlu kita pecahkan dan mencari solusinya pada hemat saya akhir-akhir ini adalah mencoba meningkatkan *content* yang ada pada pesan komunikasi sosial. Hal ini perlu dilakukan karena sekarang ini cukup banyak berkembang media massa baru namun ketertarikan mereka lebih pada memunculkan dan *memblow up* berita-berita buruk atau *bad news* semata termasuk mengenai kepolisian. Kita sepakat memang fungsi komunikasi massa salah satunya adalah mencoba melakukan kontrol sosial, namun di lain sebenarnya terdapat juga fungsi lain yakni informasi, edukasi, dan hiburan di samping fungsi kontrol

sosial itu sendiri (Nurudin 2003:64).

Isi pesan dalam pengkomunikasian sosial juga hendaknya memperhatikan budaya-budaya yang hidup dan berkembang dalam beragam masyarakat multikultural seperti di Indonesia ini (Mulyana 2007:176). Jika tidak maka pengkomunikasian ide dan gagasan serta upaya-upaya melakukan diseminasi dapat terkendala oleh karena faktor-faktor budaya. Hal ini relevan karena memang bangsa Indonesia sangat beragam dalam soal kekayaan budaya serta keanekaragaman budaya lokal yang bisa berbeda-beda pada suatu tempat dengan tempat lainnya.

Sehubungan dengan gambaran di atas seharusnya ke depan fungsi informasi dan edukasi juga dapat dijadikan fokus *content* komunikasi sosial. Polri dengan segenap organnya termasuk kehumasan, *public relations* serta garda terdepan yang bersentuhan dengan masyarakat ataupun perpolisian masyarakat (Polmas) dapat didayagunakan untuk mendorong mengimbangi *bad news* yang dilansir oleh sebagian media massa lainnya. Tentu pada akhirnya adalah bermuara pada kualitas informasi yang terbaik yang disajikan bagi publik.

Suatu hal yang dapat menjadi penyeimbang dari berkembangnya media massa yang mengedepankan *bad news* memang alternatifnya adalah memberikan kualitas informasi dan kualitas isi edukasi dalam media-media untuk komunikasi sosial, termasuk melalui upaya *public relations* atas kegiatan serta

kinerja positif atau keberhasilan tugas kepolisian, tentu dengan menyadari adanya pandangan masyarakat yang kadangkala beragam atau plural.

Komunikasi dan pesan-pesan tentang kepolisian itu pada akhirnya mungkin untuk beberapa hal perlu dirancang secara beragam menyesuaikan sasaran komunikasi yang majemuk di negeri kita ini. Kesesuaian itu juga misalnya adalah mencoba memberikan daya tarik kepada kalangan generasi muda yang menjadi penerus generasi pembangunan dan potensi penting dalam perubahan sosial di negeri ini pada masa yang akan datang.

Kiranya komunikasi sosial yang disebut terakhir, *content*nya dapat memanfaatkan perkembangan teknologi dalam bidang komunikasi dan informasi, yang tentu saja memberikan peluang untuk meningkatkan kapasitas isi pesan, kecepatan penyampaian pesan dan visualisasi yang menjadi daya tarik dan pada akhirnya *audiens* merasa berkepentingan dengan isu-isu pembangunan tersebut.

Pesan-pesan komunikasi sosial yang disampaikan oleh media sendiri pada akhirnya sebenarnya akan sampai ke masyarakat, tentu dengan tersedianya pula kualitas media yang sesuai dengan pesan dan kemampuan dari media untuk meneruskannya ke audiens, sebagaimana disampaikan Hedebro (dalam Nasution 2004) yang menandakan bahwa massa dapat bertindak sebagai pengganda sumber-sumber daya pengetahuan. Media membawa

content-content pengetahuan yang penting yang menjadi sumber bagi inovasi dan pengembangan gagasan-gagasan baru yang berguna bagi pengembangan masyarakat serta bermanfaat bagi kemajuan dan bagi dunia kepolisian.

E. PENUTUP

Komunikasi sosial pada akhirnya haruslah memperhatikan sebuah tradisi baru yang hendak dibangun di Indonesia yakni keterbukaan dan transparansi serta *good governance* untuk melayani publik. Faktor keterbukaan informasi ini kiranya pada masa lalu mendapat porsi yang kurang memadai, terbatas dan tertutupnya akses informasi ini bagi publik. Apalagi kini juga sudah ditopang dengan lahirnya perundangan keterbukaan informasi publik ini, sehingga suka atau tidak suka, cepat atau lambat lembaga-lembaga, institusi publik, badan-badan pemerintah atau instansi publik lainnya haruslah memahami masalah keterbukaan informasi publik itu, tak terkecuali kelembagaan Polri pada berbagai tingkatan.

Publik haruslah mendapatkan kesempatan untuk memperoleh beragam informasi yang berguna bagi kemajuan masyarakat, bagi upaya meningkatkan kepastian akan masalah-masalah hukum yang dihadapinya dan tentu saja harus dapat memperolehnya dengan baik dan tanpa mengalami kendala yang berarti. Terutama sekali prioritasnya bagi pemerintah maupun badan-badan publik, termasuk dalam

konteks ini Polri, karena institusi-institusi tersebut mendapatkan alokasi penganggaran baik dari sumber-sumber APBN atau mungkin juga APBD yang tentu saja merupakan dana publik yang harus dipertanggungjawabkan dan berlaku azas transparansi.

Lembaga-lembaga itu pulalah yang memang mengemban amanah merancang kebijakan publik yang berkualitas dan dalam kaitannya dengan Polri juga adalah lembaga publik tersebut di atas yang menjalankan tugas-tugas kepolisian dan menjadi pelayan bagi masyarakat. Ini sekaligus juga adalah sebagai upaya mendapatkan lebih banyak lagi *trust* (kepercayaan) dari publik.

F. DAFTAR PUSTAKA

Akademi Kepolisian. Diktat Komunikasi Sosial. 2010. Semarang: Penerbit Akpol

Mulyana, Deddy. 2002. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya.

.....2005. *Nuansa – Nuansa Komunikasi dan Budaya Komunikasi Masyarakat Kontemporer*. Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya.

Nasution, Zulkarimen. 1988. *Komunikasi Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Rogers, Everet M 1978. *Communications of Inovations: A Cross-Cultural Approach*. New York: The Free Pers.

Ruslan, Rosady. 2005. *Manajemen PR dan Media Komunikasi*. Jakarta: PT Rajawali Pers.

Seven, Werner. J dan James W. Tankard. 2005. *Teori Komunikasi: Metode dan Penerapan di Media Massa*. Jakarta: Prenada Media.

